

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

SAYED MUHAMMAD MULIADY
NPM : 71220123046

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAYED MUHAMMAD MULIADY
NPM : 71220123046
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)**

Disetujui untuk diuji oleh
Panitia Ujian Tesis
Medan, 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H

Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konsep	12
E. Keaslian Penelitian	26
F. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	28
3. Alat Pengumpulan Data	29
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..	30
5. Analisis Data	32
 BAB II : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA	 34
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	42
3. Jenis-jenis tindak pidana korupsi	46
B. Prinsip Tata Kelola Dana Desa	59
1. Pengertian Dana Desa	59
2. Tujuan Dana Desa	61

3. Prinsip Tata Kelola Dana Desa	65
BAB III : AKIBAT HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA	74
A. Faktor Penyebab Kepala Desa Melakukan Korupsi	74
B. Akibat Hukum Kepala Desa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	83
C. Upaya Pencegahan Agar Kepala Desa Tidak Melakukan Korupsi	92
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA PADA PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2021/PN BGL	105
A. Deskripsi Kasus	105
B. Dakwaan	112
C. Tuntutan	116
D. Pertimbangan Hakim	120
E. Amar Putusan	129
F. Analisis Penulis	133
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Budiono, H., *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2006
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- Dampin, Nopsianus Max, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta Timur, 2019
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa*, 2019
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, Jakarta, 2016
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Hadi, Badiul, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, Kompak, Jakarta, 2020
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008

- Indra, Mexasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Indrawati, Sri Mulyani, *Buku Saku Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta, 2017
- Kaligis, OC, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Machmud, Shahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018
- Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Nursya A, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Alungdan Mandiri, Jakarta, 2020
- Nurdjana I.G.M, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

- Saibani, A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, 2014
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, dkk., *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Syamsuddin, A., *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

C. Jurnal

Adi, Dede Kusno, dkk., *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa, Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024

Ahmad, A., & Nggilu, N. M., *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2020

Delfiandi, dkk., *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 74/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn. Bna)*, *Journal Of Science and Social Research*, Vol. 7, No. 4, 2024

Gunawan, Indra dan Yohanes Bahari, *Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)*, *Journal of Human And Education*, Vol. 4, No. 4, 2024

Hasanuddin, Muhammad, Helmi, Mispansyah, *Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa*, *Banua Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2023

Karuh, Meyfy Merci dan Tuti Widyaningrum, *Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri*, *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4, No. 1, 2024

Muabezi, Zahermann Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017

Nggilu, N. M., *Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2020

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, *Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8. No. 2, 2022

Setiyawan, dkk., *Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Diversi: Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 2, 2022

Widiyani, H., *Kajian Kriminologis Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintang Kepulauan Riau)*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 9, Vol. 1, 2021

Zakariya, Rizki, *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6, No. 2, 2020

D. Internet

<https://nasional.kontan.co.id/news/sejak-2015-total-alokasi-anggaran-dana-desa-capai-rp-6089-triliun> diakses pada 10 Agustus 2025 Pukul 13.23 WIB

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 20 Oktober 2023 Pukul 15.07 WIB

<https://www.bancak.id/artikel/2024/10/29/kementerian-keuangan-rilis-pagu-dana-desa-tahun-2025> diakses pada 14 Agustus 2025 Pukul 20.41 WIB

<https://www.metrotvnews.com/read/koGCdGj2-ratusan-kepala-desa-korupsi-dana-desa-sejak-2015-masyarakat-perlu-lebih-mengawasi> diakses pada 17 Agustus 2025 Pukul 23.53 WIB

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/magelang/id/data-publikasi/artikel/2948-check-and-balance-pengelolaan-keuangan-desa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html> diakses pada 17 Agustus 2025 Pukul 23.54 WIB

<https://www.dw.com/id/soal-masa-jabatan-kades-icw-kemukakan-data-korupsi-desa> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 14.25 WIB